

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas berkah dan rahmat-nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Sumbangan Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah dengan perhitungan angka Indeks Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Kabupaten Jombang)**”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa walaupun penulis sudah berusaha sebaik-baiknya dalam penyusunan skripsi ini, namun tanpa bantuan, motivasi, bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP selaku Dosen Pembimbing yang secara langsung telah membantu memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penyusunan skripsi ini. serta demikian juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Marseto DS, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Ec. Wiwin Priana , M.T selaku Dosen konsultasi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Pimpinan dan Staf Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi.
7. Kedua Orang Tuaku, adik-adik, serta Semua keluarga-ku, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas Do’a dan dukungannya baik secara moril, materil dan segala perhatian, semangat, cinta, kasih dan sayangnya yang banyak membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. .

Semoga Allah SWT memberikan limpahan berkah, rahmat serta karunia-Nya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan saran dan kritiknya atas penulisan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surabaya, Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I    PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5

### **BAB II   TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	6
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Otonomi Daerah.....	10
2.2.2. Sumber Penerimaan Pemerintah .....	14
2.2.3. Sumber Pendapatan Negara .....	19
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah sebagai Bagian dan Pendapatan Daerah.....	22

2.2.5. APBD .....	22
2.2.5.1. APBD.....	22
2.2.5.2. Penerimaan Rutin.....	23
2.2.6. Sumber Penerimaan Daerah.....	26
2.3. Kerangka Pikir.....	36
2.4. Hipotesis .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variable .....	39
3.2. Teknik Penentuan Sampel .....	43
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.3.1. Jenis Data .....	43
3.3.2. Sumber Data .....	43
3.3.3. Pengumpulan Data .....	44
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	46
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Jombang .....	46
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	47
4.2.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.....	47
4.2.2. Pajak Daerah.....	51

4.2.3. Retribusi Daerah.....	52
4.2.4. Laba Perusahaan Daerah .....	53
4.2.5. Lain-lain PAD yang sah .....	53
4.2.6. Dana Perimbangan.....	54
4.2.7. Lain-lain Pendapatan yang sah.....	55
4.3. Analisis dan pengujian Hipotesis Indeks Desentralisasi	
Fiskal .....	55
4.3.1. Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal .....	56

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Daerah Tahun 2002-2007 ( dalam jumlah juta rupiah ).....	49
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah tahun 2002-2007.....	50
Tabel 3. Data Proporsi Dana Perimbangan tahun 2002-2007.....	54
Tabel 4. Rasio Pandapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2002-2007.....	57
Tabel 5. Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2002-2007.....	59
Tabel 6. Rasio Sumbangan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2002-2007.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Data Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Jombang tahun  
2002-2007

Lampiran 2 : Data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak(BHPBP) Kabupaten  
Jombang tahun 2002-2007

Lampiran 3 : Data Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus Kabupaten  
Jombang tahun 2002-2007

**ANALISIS PENDAPATAN HASIL DAERAH, BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN, DAN  
SUMBANGAN DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH DENGAN  
PERHITUNGAN ANGKA INDEKS DESENTRALISASIFISKAL  
(STUDI KASUS KABUPATEN JOMBANG)**

**Oleh :**

**M.Fathur Rozi**

**ABSTRAKSI**

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Jombang diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Penerimaan Daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Penerimaan Daerah, perlu diadakan analisis potensi dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Sumbangan Daerah.

Agar dapat menopang penerimaan daerah tersebut digunakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah (TPD), rasio antara BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) terhadap total pendapatan daerah (TPD), dan Rasio SD (Sumbangan Daerah) total pendapatan daerah (TPD). Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), SD (Sumbangan Daerah) daerah Kabupaten Jombang. Teknik analisa yang digunakan yaitu Indeks Desentralisasi Fiskal, sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan BPS (Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan perhitungan Indeks Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jombang masih belum mandiri karena peranan PAD dan juga BHPBP sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. Meskipun belum mandiri tetapi Kabupaten Jombang semakin tahun menunjukkan grafik peningkatan pada PAD dan BHPBP. Tetapi peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut pajak daerah juga perlu ditinjau kembali oleh pemerintahan Kabupaten Jombang untuk menjadi daerah yang otonom ataupun mandiri

**Kata kunci: Indeks Desentralisasi fiskal dan kemandirian Daerah  
Kabupaten Jombang**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan

datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002: 3-4).

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan melihat berbagai potensi yang ada dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Mengingat keterbatasan tenaga yang professional maupun dana yang tersedia maka Pembangunan Nasional dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Kondisi yang demikian itu akan mendorong para pelaku pembangunan untuk lebih berorientasi kepada kemampuan sendiri. Dengan mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas Desentralisasi maka dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, berdaya guna, dan berhasil guna maka dibentuklah Daerah Otonomi (Anonim, 2004 : 8)

Otonomi bagi Daerah mempunyai banyak tujuan, salah satunya adalah guna menambah kelancaran pembangunan di daerah dan terciptanya suatu kesinambungan pertumbuhan pembangunan yang dicapai serta pemerataan hasil-hasilnya. Guna mewujudkan fenomena diatas satu hal yang harus dimiliki oleh Daerah yaitu kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Kebutuhan penyediaan dan pembangunan ini dirasa sangat penting dan relevan dengan konsepsi Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab karena

pada dasarnya yang hendak dibangun serta ditingkatkan adalah kekuatan pembangunan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Jombang maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan analisis potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak agar dapat menopang dari suatu penerimaan daerah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah indikator desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah.

Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat. Adapun PAD pada kabupaten Jombang tahun 2002 adalah Rp. 45.097.701 dengan proporsi 0,13, kemudian pada tahun 2003 adalah Rp. 70.114.759 dengan proporsi 0,15, sedangkan pada tahun 2004 menjadi Rp. 44.534.969 dengan proporsi 0,10 kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp. 48.990.313 dengan proporsi 0,11. Tahun

2006 Rp. 42.144.160 dengan proporsi 0,08 dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 68.170.329 dengan proporsi 0.10. (Anonim, 2008 : 272)

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu untuk terciptanya kemandirian pada kabupaten Jombang, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dengan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan daerah di Kabupaten Jombang dalam masa otonomi daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul Skripsi dengan judul “Analisis PAD, BHPBP, dan SD, terhadap Total Penerimaan Daerah dengan angka Indeks Desentralisasi Fiskal studi kasus Kabupaten Jombang”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah), BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), Sumbangan Daerah dapat mendukung Kabupaten Jombang untuk menuju mandiri ?

2. Apakah indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang sudah bisa dikatakan mandiri?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Sumbangan Daerah dapat mendukung Kabupaten Jombang menjadi daerah yang mandiri atau tidak.
2. Untuk mengetahui indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang sudah bisa dikatakan mandiri.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Jombang dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti yang mengambil topik perusahaan daerah di Kabupaten Jombang.
3. Sebagai bahan penerapan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung serta dapat membandingkan dengan kenyataan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.